MENGENAL BUDAYA HUKUM DARI PERSPEKTIF PLURALISME HUKUM

Devrayno
STIH Tambun Bungai Palangka Raya
E-mail : devrayno@ yahoo.com

Abstract

Law is a social arena associated with humans, human beings as social beings are always associated with other human beings in a social life, no social life in society then there is no law. The law servers to regulate the relationships between people, the plurality of these social relations will affect the existence of law. In other words not all existing social structures will be able to follow the legal system. An undeniable that Indonsia is a country that has a diversity of tribal, religions, language and culture including law. In a society of course apply several legal system, such as the enactment of costumary law in local indigenous communities, in addition it also applies the law of religion and state law. This diversity is also known as legal pluralism.

Keywords : legal culture, and legal pluralism.

PENDAHULUAN

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang saling tergantung satu dengan lainnya, dikenal pula dengan hidup bermasyarakat, hal ini menyebabkan manusia hidup berkelompok-kelompok dengan menganut cara pandang integralistik, dalam cara pandang ini memberikan kebebasan untuk menciptakan sesuatu agar harkat dan martabat mereka terlindungi, di mana sesuatu ini bisa berhubungan dengan aturan-aturan yang mereka buat yang sering disebut pula dengan istilah “hukum”.

Sekarang ini hampir tidak ada aspek kehidupan manusia yang tidak tersentuh oleh hukum artinya hukum sebagai penormaan perilaku sangat penting agar perilaku masyarakat tidak menyimpang. Supaya perilaku masyarakat tidak berseberangan dengan hukum tentunya dibutuhkan kesadaran masyarakat untuk patuh dan taat pada hukum. Kesadaran itu merupakan jembatan penghubung antara hukum dengan perilaku masyarakat.

Kesadaran hukum masyarakat terkait erat dengan budaya hukum masyarakatnya dengan kata lain dapat

dijelaskan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat tinggi atau rendah dapat dilihat pada budaya hukumnya, jika budaya hukumnya cenderung positif, proaktif terhadap cita hukum tentu masyarakatnya memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Hukum dan masyarakat berhubungan secara timbal balik, karena hukum sebagai sarana pengantar masyarakat, bertingkah laku di dalam masyarakat dilaksanakan oleh pula oleh masyarakat. Hubungan tersebut bisa bersifat simbiosis mutualistik yaitu mendukung tumbuh dan tegaknya hukum maupun sebaliknya bersifat parasitis, yaitu menghambat tumbuh berkembang dan tegaknya hukum.

Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi mendefinisikan kebudayaan sebagai hasil karya, rasa dan cipta manusia, karya dalam hidup manusia berwujud “teknologi” yang mempermudah hidup manusia. Rasa merupakan dasar dari munculnya nilai-nilai kemasyarakatan dan cipta merupakan kemampuan mental emosional manusia untuk hidup beradab. Dalam arti luas kebudayaan merupakan serangkaian nilai-nilai yang hendak dicapai oleh sebuah

komunitas tertentu, sekaligus budaya pedoman arah hidup manusia.

Dengan demikian budaya hukum mengandung nilai prosedural yaitu tata cara dan proses dalam memanajemenisasi sebuah nilai berupa asas-asas fundamental tentang alokasi, distribusi, penggunaan sumber-sumber dalam masyarakat terkait dengan adil. Jadi dapat dikatakan “budaya hukum” adalah keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum¹.

Membicarakan persoalan hukum senantiasa harus dikaitkan dengan basis sosial dan nilai-nilai tertentu di mana hukum itu beroperasi. Dalam konteks Indonesia dengan kemajemukan sosial dan adanya pluralisme hukum akan membuat hubungan-hubungan sosial yang terjadi antar individu menjadi bervariasi.

PERMASALAHAN

Dari fenomena diatas memperlihatkan adanya pergumulan

¹Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta. : PT. Raja wali Perss, hlm. 2

sistem hukum, yaitu sistem hukum Negara, sistem hukum adat maupun hukum agama yang berlaku secara bersama-sama dalam konteks pengaturan kehidupan dalam masyarakat, yaitu hukum positif dan hukum adat. yang menarik bukanlah keaneka-ragaman peraturan-peraturan hukumnya, akan tetapi yang lebih penting adalah bagaimana sistem hukum tersebut berinteraksi dalam suatu arena sosial.

Dari uraian tersebut diatas terdapat beberapa masalah yang perlu dikemukakan sebagai persoalan untuk mendapatkan perhatian yaitu : bagaimanakah hubungan hukum dengan masyarakat dan bagaimanakah interaksi hukum negara dengan hukum adat (lokal) dalam suasana pluralisme hukum.

PEMBAHASAN

1. Hubungan Hukum dan Masyarakat.

Manusia sebagai makhluk sosial tentunya tidak dapat hidup sendiri tanpa manusia lainnya artinya manusia saling tergantung satu dengan lainnya, dikenal pula dengan hidup bermasyarakat, hal ini menyebabkan manusia hidup

berkelompok-kelompok atau menganut cara pandang integralistik, dalam cara pandang ini memberikan kebebasan untuk menciptakan sesuatu agar harkat dan martabat maupun hak asasi manusia terlindungi.

Hukum merupakan sesuatu yang berkenaan dengan manusia, manusia yang berhubungan dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup, tanpa pergaulan hidup dalam masyarakat maka tidak ada hukum. Hukum berfungsi mengatur hubungan pergaulan antar manusia. Kemajemukan hubungan sosial ini akan mempengaruhi apresiasinya terhadap hukum modern. Dengan kata lain tidak semua struktur sosial yang ada akan mampu mengikuti sistem hukum yang modern itu, baik karena alasan praktis maupun alasan nilai-nilai yang telah mengakar dalam lingkup basis sosial tertentu².

Pola ideal sistem pengaturan dan pengorganisasian kehidupan masyarakat dengan sarana hukum

²Suparman Marzuki. *Hukum Modern dan Institusi Sosial. Dalam Hukum dan Perubahan Masyarakat*. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. 1997.hlm. 33

meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, baik dalam bidang sosial dan budaya maupun dalam bidang ekonomi dan politik. Dalam konteks ini hukum merupakan pedoman bertingkah laku dalam kehidupan masyarakat, oleh karena itu hukum mempunyai kedudukan penting dalam kehidupan bermasyarakat.

Sistem pengaturan dan pengorganisasian dalam kehidupan masyarakat dengan sarana hukum, meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat baik dalam bidang sosial dan budaya, ekonomi maupun politik. Dalam konteks ini hukum merupakan pedoman bertingkah laku dalam kehidupan masyarakat.

Adanya tuntutan bahwa hukum yang dibuat tidak boleh hanya bersifat praktis, efisien dan efektif, melainkan harus bermaksud untuk mewujudkan suatu tatanan yang oleh masyarakat dirasakan sebagai adil dan sesuai dengan penghayatan tentang martabat mereka sebagai manusia. Semua unsur yang relevan sebagai rasa keadilan

dalam hubungannya dengan tata tertib hukum harus memperhatikan nilai-nilai, norma-norma kehidupan yang tercermin dalam budaya hukum nasional.

Hukum memiliki hubungan timbal balik dengan masyarakatnya, karena hukum itu sendiri merupakan sarana pengatur masyarakat dan bekerja di dalam masyarakat. Itulah sebabnya hukum tidak lepas dari gagasan maupun pendapat-pendapat yang hidup dalam masyarakat. Struktur masyarakat dapat menjadi penghambat sekaligus dapat memberikaan sarana-sarana sosial, sehingga memungkinkan hukum dapat diterapkan dengan sebaik-baiknya³.

Kehadiran hukum pada masyarakat yang sedang membangun merupakan proses yang harus ditempuh oleh masyarakat untuk menjadikan sebagai sarana yang dapat menjalankan peranannya dengan efektif. Oleh karena itu perubahan-perubahan besar yang terjadi di

³Esmi Warrasih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Penerbit Suryandaru Utama, Semarang.2005. hlm. 85

dalam hukum maupun dalam masyarakat sebagai konsekuensi logis dari pembangunan.

Keberadaan hukum dalam pelaksanaannya tidak dengan sendirinya merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) bagi suatu perubahan yang dikehendaki, sebab selain hukum tersebut tentunya mempunyai batas-batas kemampuan dalam pelaksanaannya, juga tidak dapat dikatakan bahwa hukum yang baik akan dapat menjawab segala persoalan yang timbul dalam kehidupan masyarakat dari suatu keadaan sosial yang baik.

Dapat dikatakan bahwa hukum hendaknya selain sebagai alat menunjang modernisasi juga sebagai arahan bagi dinamika pembangunan sosial ekonomi, oleh karena itu pembangunan hukum nasional harus diorientasikan pada pembinaan substansi, struktur dan budaya hukum yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan.

Hukum dan masyarakat bagaikan dua sisi mata uang, di mana ada masyarakat di sana ada

hukum (*Ubi societas ibi ius*), keduanya tidak dapat dipisahkan. Berlakunya hukum dalam masyarakat akan berakibat terjadinya perubahan sosial pada masyarakat itu sendiri, hukum yang tidak dikenal atau tidak memenuhi nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat tentunya tidak akan bekerja secara efektif.

Kenyataannya bahwa tidak selamanya hukum itu dapat memenuhi keinginan perubahan dalam masyarakat atau dengan kata lain bahwa hukum itu tidak selamanya dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh hukum, dan dalam pelaksanaannya tentu diperlukan piranti piranti aturan lain yang menunjang berlakunya hukum tersebut, seperti kebijakan yang diharapkan mampu memberikan tindakan yang lebih kontekstual dengan kondisi riil yang ada.

Hukum merupakan kaidah tertinggi yang harus diikuti oleh masyarakat dalam melakukan interaksi sosial, dan oleh pengusaha negara dalam

menyelenggarakan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Konsep-konsep, ide-ide dan cita-cita sosial yang melekat secara inheren dalam hukum tersebut merupakan pancaran sistem nilai yang hidup dalam sanubari masyarakat.

Secara substansial, hukum tidak pernah lepas dari struktur rohaniah masyarakat yang bersangkutan, atau masyarakat yang mendukung hukum tersebut. Hukum mempunyai korelasi dengan kebudayaan, struktur berpikir dan corak masyarakat. Hukum yang secara esensial selalu ada dan mengada di dalam masyarakat, senantiasa terkait dengan postulat moral yang hidup dalam masyarakat⁴.

Hukum memang berpijak pada basis sosial tempat ia tumbuh, berlaku dan berkembang, dimensi substantif dari hukum memperoleh tempat yang sentral, di dalam paradigma sistem sosial. Dalam paradigma ini hukum dilihat tidak

lebih dari sebuah sub sistem dari keseluruhan sistem sosial⁵.

Pola ideal sistem pengaturan dan pengorganisasian kehidupan masyarakat dengan sarana hukum meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, baik dalam bidang sosial dan budaya maupun dalam bidang ekonomi dan politik. Dalam konteks ini hukum merupakan pedoman bertingkah laku dalam kehidupan masyarakat, oleh karena itu hukum mempunyai kedudukan penting dalam kehidupan bermasyarakat.

Sesuai dengan pendapat Savigny yang melihat hukum sebagai fenomena historis, di mana hukum tidak dibuat akan tetapi tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat, sehingga keberadaan setiap hukum adalah berbeda antara masyarakat bergantung pada tempat dan waktu berakunya hukum, di mana hukum harus dipandang sebagai penjelmaan dari jiwa atau rohani suatu bangsa (*volksgeist*)⁶. Begitu

⁴Alkostar, Artidjo (ed), *Identitas Hukum Nasional*, Yogyakarta. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Hal. 1997. hlm. XI

⁵Nasikun, *Hukum Dalam Paradigma Sistem Sosial* Jakarta. : PT. Rajawali Perss. 1997. hlm. 163

⁶Otje Salman Sumadiningrat. *Rekonseptualisasi Hukum Adat*

pula pandangan Maria Rita Ruwiasuti, bahwa proses pembuatan hukum sebenarnya dapat dikuasai oleh kelompok manapun, asal saja mereka memiliki kekuatan atau kekuasaan, artinya rakyatpun dapat mengendalikan proses pembentukan hukum guna menciptakan aturan aturan yang mendukung, menjamin, menjaga dan melindungi kepentingan mereka sendiri⁷. Senada Posner, bahwa hukum dalam masyarakat tumbuh dan berkembang dengan jiwa rakyatnya, di mana tiap tiap bangsa mempunyai *volksgeist* yang mungkin berbeda. Semua itu tergantung pada latar belakang dan faktor faktor pengaruhnya⁸.

Sehingga dapat dikatakan Hukum sebenarnya mencerminkan kebutuhan masyarakat tempat hukum itu berlaku. Oleh karena itu hukum diciptakan oleh masyarakat

sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan oleh masyarakat tersebut.

Jadi Keberadaan hukum sangat berperan dalam pembangunan secara langsung, baik bertindak sebagai alas dasar, maupun sebagai sarana pengaturan. Hal ini merupakan konsekwensi logis dari konsep pembangunan yang simultan. Oleh karena itu hukum bertindak selaku motor penggerak pembangunan dan sekaligus menopang nilai-nilai pembangunan. Pembangunan melambangkan proses multidimensi yang meliputi adanya perubahan struktur sosial, sikap rakyat, tatanan kelembagaan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi.

2. Interaksi Hukum Negara dengan Hukum Adat (Lokal) dalam Suasana Pluralisme Hukum

Indonesia ingin membangun sistem hukum yang koheren dalam suasana negara yang pluralistik tanpa harus menghilangkan perbedaan etnik, budaya dan praktek sosial dari masyarakatnya. lahirnya kelompok uniformis di satu sisi dan pluralis di

Kontemporer. Penerbit Alumni. Bandung.2002. hlm. 3,

⁷Maria R Ruwiasuti. "*Sesat Pikir*" *Politik Hukum Agraria Membongkar Alat Penguasaan Negara Atas Hak Hak Adat*. Penerbit Insist Press dan Pustaka Pelajar. Yogyakarta.2000. hlm. vii

⁸Richard A Posner. *Frontiers of Legal Theory*. Cambridge, Massachusetts, London, England : Harvard University Press. 2001. hlm. 194

sisi lainnya. Kelompok uniformis berargumen bahwa negara harus mengadaptasikan dirinya dengan model negara modern jika pertumbuhan dan pembangunan ingin digalakan. Sedangkan para pluralis di sisi lain berpendapat bahwa satu satunya hukum yang dapat dipraktekan bagi masyarakat hetrogen seperti di Indonesia ini hanyalah hukum yang pluralistik sifatnya⁹.

Suatu realitas yang tidak mampu dipungkiri bahwa Indonesia adalah suatu negara yang memiliki kemajemukan suku, agama, bahasa dan budaya, termasuk hukum yang secara nyata hidup dan berkembang dalam komunitas-komunitas lokal di berbagai penjuru persada nusantara. Hukum-hukum lokal, yang dikenal sebagai hukum adat, menjadi kenyataan hukum yang hidup dan secara nyata dioperasikan oleh masyarakat hukum adat untuk menjaga keteraturan sosial (*social order*) dan perlindungan sumber daya alam dalam wilayah ulayat mereka masing-masing¹⁰.

⁹Ratno Lukito. *Pergumulan Antara Hukum Islam Dan Adat Di Indonesia*. Penerbit INIS. Jakarta. 1998. hlm. 64

¹⁰I. Nyoman Nurjaya. *Menuju Pengelolaan Sumber Daya Hutan Yang*

Dengan demikian dalam suatu masyarakat tentunya berlaku beberapa sistem hukum, seperti berlaku hukum adat yang merupakan hukum kebiasaan yang berlaku dikalangan anggota masyarakat adat setempat, di samping itu berlaku pula hukum negara yang dibuat lembaga yang mempunyai kekuasaan dan wewenang yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pengakuan suatu hukum adat oleh hukum negara tentunya membawa permasalahan sendiri seputar kepastian hukum, pengakuan ini dapat dilakukan terlebih dahulu terhadap aturan yang hidup dalam masyarakat tersebut, seperti hukum waris adat, hukum keluarga, di mana sekaligus pengakuan ini diikuti dengan pengakuan atas peradilan adat yang akan menangani permasalahan berdasarkan hukum adat yang diakui.

Pengakuan atas keberadaan hukum adat secara tersirat sebenarnya sudah tampak dalam konstitusi. Di mana kewenangan yang

Berorientasi Pada Pola Kooperatif : Perspektif Legal Formal; Makalah dalam Lokakarya : Peningkatan Fungsi dan Manfaat Sumber Daya Hutan Untuk Pengembangan Perusahaan dan Masyarakat, Yogyakarta, 29-30 Maret 1999.hlm.3

diberikan kepada negara bertujuan untuk memakmurkan dan mensejahterakan rakyat, secara teortik negara menganut konsep negara kesejahteraan (*welfare state*), di mana dalam negara kesejahteraan ini individu maupun masyarakat (adat) tetap diakui hak-haknya sekalipun terbatas. Dalam negara bercorak agraris maka pemilikan lahan / tanah merupakan kebutuhan untuk memenuhi hak mereka mendapatkan kehidupan yang layak. Hal ini menunjukkan adanya persamaan konsep penguasaan dan pemilikan oleh individu, masyarakat maupun negara yang terpadu bertujuan sama, yaitu menuju masyarakat yang sejahtera.

Pemahaman yang lebih komprehensif melihat bahwa interaksi hukum negara dengan hukum adat atau hukum yang bukan berasal dari negara sama-sama memiliki pengaruh dan saling bersinggungan, meskipun demikian konflik antar hukum yang berlaku atas suatu wilayah sering kali menyebabkan hukum lokal dikalahkan melalui proses otorisasi

negara yang berhak mengeluarkan dan mengesahkan segala kebijakan¹¹.

Dalam sudut pandang pluralisme hukum, keberadaan hukum negara merupakan realitas politik guna mengatur hubungan warga negaranya, dan keberadaan hukum lokal (adat) adalah suatu realitas sosiologis yang keberadaannya dalam perspektif historis jauh sebelum sistem hukum negara hadir. Hubungan hukum negara dengan hukum adat dapat dikatakan bersifat mendua, di satu sisi hukum negara selalu ditempatkan pada posisi yang lebih penting jika dibandingkan dengan hukum adat, dan di sisi lain hukum negara mengakui keberadaan hukum adat dengan persyaratan tertentu. Seperti “sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional”, “sepanjang kenyataannya masih ada”.

Dalam perkembangannya, Griffiths membedakan konsep

¹¹R. Herlambang Perdana dan Bernadinus Stenly. *Gagasan Pluralisme Hukum Dalam Konteks Gerakan Sosial*. Dalam Andri Akbar, dkk. (penerjemah). *kumpulan tulisan Pluralisme Hukum : Sebuah Pendekatan Interdisiplin*. Penerbit Perkumpulan Untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), Jakarta. 2005.hlm. 221

pluralisme menjadi dua macam pluralisme, yaitu : *weak legal pluralism* dan *strong legal pluralism*. *Weak legal pluralism* merupakan bentuk pluralisme hukum yang lemah adalah bentuk lain dari sentralisme hukum, karena meskipun mengakui adanya pluralisme hukum, tetapi hukum negara tetap dipandang sebagai superior. Sementara itu *strong legal pluralism* merupakan konsep pluralisme yang kuat, di mana semua yang ada dipandang sama kedudukannya dalam masyarakat. Tidak terdapat hirarkhi yang menunjukkan sistem hukum yang satu lebih tinggi dari sistem hukum yang lain¹².

Sebagaimana halnya dalam pengelolaan sumber daya hutan, dilihat dari aspek yuridis maka para pengusaha dengan izin usaha yang diberikan Pemerintah mempunyai hak yang kuat dalam pengelolaan dan pengusahaan sumber daya hutan dalam suatu area tertentu. Namun kenyataannya area yang diberikan ijin oleh Pemerintah sering kali berada dalam lokasi hutan atau lahan yang dimiliki oleh masyarakat adat. Di

mana sebelum adanya negara, masyarakat adat telah mendiami dan mengolah hutan tersebut terlebih dahulu.

Masyarakat adat pada hakekatnya melihat hutan sebagai akses sistem kehidupan, bagi mereka hutan tidak semata-mata bermakna ekonomis, melainkan juga terdapat nilai-nilai sosial budaya – relegius, dan berfungsi sosial, dengan demikian dapat dikatakan mereka juga merupakan bagian dari hutan itu sendiri. Oleh karena itu menurut masyarakat adat bahwa hutan dalam wilayah penguasaan dari kedaulatan mereka, mempunyai hak kepemilikan yang jelas dan pengelolaannya berdasarkan hukum adat.

Wawasan yang holistik ini membuat masyarakat adat tidak melakukan pemisahan yang jelas antara manusia dengan alam sekitarnya, bahkan keduanya memiliki kekuatan dan kekuasaan yang saling mendukung untuk menjaga agar keseimbangan alam dapat terjaga.

Dalam kehidupan sehari-hari alam pikiran ini terimplementasikan dalam tradisi-tradisi penguasaan dan

¹²*Ibid.* hlm. 59

pengelolaan sumber daya hutan melalui upacara-upacara adat atas suatu peristiwa tertentu yang berhubungan dengan hutan, seperti membuka hutan untuk berladang.

Berdasarkan hak atas properti terhadap sumber daya alam, di mana penguasaan lahan/ladang yang diperoleh dari membuka hutan, merupakan hak atas pemanfaatan sumber daya alam oleh individu maupun kelompok yang diakui dan oleh masyarakat adat secara luas dan dilindungi oleh hukum adat.

Konsep hak atas properti sering kali terfokus pada perumusan hak atas properti oleh hukum negara, akan tetapi dalam praktiknya terdapat interaksi berbagai aturan hukum, seperti hukum negara, hukum adat, maupun hukum agama. Pengakuan atas klaim terhadap sumber daya alam berdasarkan hak atas properti yang didasarkan pada aturan-aturan dengan konsep dan perumusan yang berbeda setiap sistem hukum yang mengaturnya¹³.

¹³Ruth S Meinzen Dick dan Rajendra Prahdan. *Pluralisme Hukum dan Dinamika Hak Atas Properti*. Dalam Andri Akbar, dkk 2005. (penterjemah) : *kumpulan tulisan Pluralisme Hukum : Sebuah Pendekatan Interdisiplin*. Penerbit Perkumpulan Untuk

Pemilikan mempunyai arti tersendiri dalam hubungannya dengan kehidupan masyarakat setempat yang diterima sebagai suatu konsep hukum adat. Apabila kita membicarakan dalam arti yang demikian itu, maka kita akan membicarakan pemilikan dalam konteks sosial, tidak lagi sebagai katagori yuridis. Dalam konteks yang demikian itu, maka pemilikan bisa merupakan indeks, tidak hanya bagi tingkat kesejahteraan dari pemiliknya, tetapi juga bagi kedudukan sosialnya.

Adanya dua kepentingan dan pandangan yang berbeda dalam melihat objek yang sama, maka masyarakat dapat dikatakan selalu berada dalam ruang konflik yang terjadi secara terus menerus, hal ini didasarkan pada asumsi bahwa masyarakat pada dasarnya telah terikat di bawah kekuatan-kekuatan dominan, baik pemerintah selaku penguasa maupun pengusaha.

Secara umum ada dua tujuan dasar setiap konflik, yakni untuk mendapatkan dan atau mempertahankan sumber-sumber

Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), Jakarta.hlm.169

yang ada, hal ini merupakan ciri manusia yang hidup bermasyarakat, karena manusia memerlukan sumber-sumber tertentu yang bersifat material-jasmaniah maupun sprituil-rohaniah untuk dapat hidup secara layak yang terhormat dalam masyarakat. Sedangkan tujuan untuk mempertahankan sumber-sumber yang selama ini sudah dimiliki juga merupakan kecenderungan hidup manusia, di mana ia akan memelihara sumber-sumber yang dimiliki dan berupaya mempertahankan dari usaha pihak lain untuk merebut atau mengurangi sumber tersebut¹⁴.

Begitu pula pendapat Nasikun, bahwa setiap masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan yang tidak pernah berakhir, atau dengan kata lain, perubahan sosial merupakan gejala yang melekat di dalam setiap masyarakat, konflik adalah merupakan gejala yang melekat di dalam setiap masyarakat, dan setiap unsur di dalam suatu masyarakat memberikan sumbangan

bagi terjadinya disintegrasi dan perubahan-perubahan sosial¹⁵.

Bertitik tolak dari kenyataan bahwa adanya dua kelompok yang sama-sama berkepentingan dengan sumber daya hutan, yaitu kelompok orang yang berkuasa (Pemerintah) dan mereka yang dikuasai (Masyarakat Adat). Dualisme ini yang termasuk struktur dan hakikat tiap-tiap kehidupan bersama, mengakibatkan kepentingan-kepentingan yang berbeda dan mungkin saling berlawanan.

Pada akhirnya perbedaan kepentingan ini dapat melahirkan kelompok-kelompok yang berbenturan. Dalam hal ini maka dapat dikatakan bahwa perbedaan ini dapat dibagi menjadi : (1) kekuasaan dan wewenang; (2) Kepentingan; dan (3) kelompok konflik¹⁶.

Penguasa mengideologikan nilai-nilai, menjadikan nilai-nilai itu sakti berdasarkan legitimasi yang diberikan

¹⁴Ramlan Surbekti. *Memahami Ilmu Politik*. Penerbit PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta. 1992. hlm. 155

¹⁵Nasikun. *Sistem Sosial Indonesia*, Penerbit PT. Rajawali Perss, Jakarta. 1995. hlm. 16.

¹⁶K.J Veerger, *Realita Sosial, Refleksi Filsafat Sosial Atas Hubungan Individu – Masyarakat Dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi*. Penerbit PT. Gramedia. Jakarta. 1993. hlm. 214

undang undang, agar sahnya perlakuan mereka selama ini menjadi kokoh. Berbeda halnya dengan kedudukan hukum adat yang selalu mengalami delematis, di mana apabila suatu saat berhadapan dengan hukum negara tentunya sudah dapat diramalkan, akan tersingkirnya hukum adat tersebut.

Berlakunya suatu hukum yang diciptakan oleh Pemerintah sebagai sarana kontrol bagi pelaksanaan pembangunan dalam masyarakat di berbagai bidang kehidupan, seringkali pelaksanaannya dihadapkan pada suatu kenyataan bahwa perilaku atau ketaatan masyarakat masih condong kepada hukum adat/kebiasaan mereka dari pada hukum negara. Ketaatan terhadap nilai-nilai dasar atau ketertiban umum dalam masyarakat dipertahankan oleh kekuatan mengikat dari adat istiadatnya. Bahwa ketaatan pada adat berlangsung sebagai bagian dari proses kehidupannya, jadi pada masyarakat sederhana adat istiadat itu sama dengan hukum.

Berlakunya hukum negara dan hukum adat di Indonesia dalam

masyarakat tentunya tidak dapat dihindari, sebab dalam masyarakat itu sendiri berlaku berbagai sistem pengaturan, seperti hukum negara, hukum adat maupun hukum agama. Terdapatnya pluralisme hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat adat, mengakibatkan terjadinya interaksi sistem hukum dalam masyarakat.

Membicarakan persoalan hukum senantiasa harus dikaitkan dengan basis sosial dan nilai-nilai tertentu di mana hukum itu beroperasi. Dalam konteks Indonesia dengan kemajemukan sosial dan adanya pluralisme hukum akan membuat hubungan-hubungan sosial yang terjadi antar individu menjadi bervariasi.

Menurut Bernad Steny, menyebutkan ada beberapa hal yang menjadi ciri penting dari pluralisme hukum, yaitu (1) tidak ada satu sistem tunggal sebagai sumber hukum; (2) adanya *semi autonomous social field* yang memiliki kapasitas membuat aturan sendiri; (3) terdapat beberapa kaidah normatif terhadap kenyataan yang bersumber pada tiap aktivitas pengaturan diri sendiri dari berbagai wilayah sosial yang beragam; dan (4)

berbagai aktivitas sosial tersebut saling pengaruh, tumpang tindih, kompetisi maupun isolasi dengan aktivitas wilayah sosial yang ada disekelilingnya¹⁷.

Dalam arena pluralisme hukum, hukum Negara di satu sisi, dan di sisi lainnya adalah hukum lokal yang pada prinsipnya tidak berasal dari Negara, yang terdiri dari hukum adat, agama, kebiasaan-kebiasaan dan lainnya yang dipandang sebagai hukum. Oleh karena itu Djaka Suhendar menyatakan dari perspektif manapun, pluralisme hukum bukan merupakan konsep anti hukum dominan (hukum negara) di satu sisi dan kemenangan hukum lokal di sisi lainnya, tetapi sebuah konsep yang tujuannya adalah : (1) memaparkan adanya ketertiban hukum yang hadir; (2) adanya berbagai pilihan hukum konstektual yang dapat digunakan sebagai alternatif pemecahan masalah; (3) adanya situasi sosio-legal yang dinamis dalam berbagai kehidupan sosial.

¹⁷Bernad Steny. "Pluralisme Hukum : Antara PERDA Pengakuan Masyarakat Adat dan Otonomi Hukum Lokal". Dalam Jurnal Pembaharuan Desa dan Agraria, Sengketa Sumber Daya Alam. Volume III/Tahun III/2006. Kerja Sama Lapera Pustaka Utama – Pusat Kajian Agraria IPB. hlm. 87

Dalam kebudayaan yang plural dengan sistem hukum rakyat yang plural pula, yang harus dilakukan dalam pengembangan hukum nasional bukan sekedar formalisasi hukum rakyat yang ada, akan tetapi lebih lanjut adalah melakukan langkah pembaharuan. Dengan jalan mengembangkan kaidah-kaidah baru yang dipandang fungsional untuk mengubah dan membangun kepentingan masa depan.

Pemahaman yang lebih komprehensif melihat bahwa interaksi hukum negara dengan hukum adat atau hukum yang bukan berasal dari negara sama-sama memiliki pengaruh dan saling bersinggungan, meskipun demikian konflik antar hukum yang berlaku atas suatu wilayah sering kali menyebabkan hukum lokal dikalahkan melalui proses otorisasi negara yang berhak mengeluarkan dan mengesahkan segala kebijakan¹⁸.
(Dalam)

Dalam sudut pandang pluralisme hukum, keberadaan hukum negara merupakan realitas politik guna mengatur hubungan warga

¹⁸Andi Akbar dkk, *Op.Cit*, hlm. 221

negaranya, dan keberadaan hukum lokal (adat) adalah suatu realitas sosiologis yang keberadaannya dalam perspektif historis jauh sebelum sistem hukum negara hadir. Hubungan hukum negara dengan hukum adat dapat dikatakan bersifat mendua, di satu sisi hukum negara selalu ditempatkan pada posisi yang lebih penting jika dibandingkan dengan hukum adat, dan di sisi lain hukum negara mengakui keberadaan hukum adat dengan persyaratan tertentu. Seperti “sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional”, “sepanjang kenyataannya masih ada”.

Hukum adat sekalipun tak tertulis dan tak memiliki ciri-cirinya yang positif adalah sesungguhnya hukum yang lebih memiliki makna sosial daripada hukum yang terwujud dan bersitegak atas wibawa kekuasaan-kekuasaan sentral pemerintah. Dibandingkan hukum Negara, hukum adat memang tak mempunyai struktur politik, namun kekuatan dan kewibawaannya memang tidak tergantung dari struktur politik itu melainkan dari kekuatan moral dan kultural. Maka dalam bingkai-

Negara kesatuan tetap tampak pluralitas dan keragaman yang kultural dalam konteks-konteksnya yang lokal dan subnasional¹⁹.

Oleh karena itu dalam pembentukan hukum negara, perlu diperhatikan beberapa unsur, seperti unsur yuridis, sosiologis dan filosofis, ada pun yang dimaksudkan dengan unsur yuridis di sini ialah bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan harus mempunyai dasar hukum yang jelas sebagai rujukan mengapa diterbitkannya kebijakan tersebut, sehingga terdapat hubungan yang harmonis antara kebijakan dengan ketentuan yang lebih tinggi yang menjadi landasan hukumnya.

Unsur sosiologis, yaitu bahwa hukum yang dibuat harus mencerminkan atau bersesuaian dengan apa yang menjadi harapan masyarakat yang di kenai hukum tersebut atau sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Untuk

¹⁹Soetandyo Wignjosebroto. *Kebijakan Negara untuk mengakui atau tak mengakui eksistensi masyarakat adat berikut hak-hak atas tanahnya*, Dalam Jurnal masyarakat adat, Nomor. 01 tahun 1998. hlm.1

pemenuhan unsur sosiologis ini dapat melibatkan masyarakat dalam setiap mengambil kebijakan, Keikutsertaan masyarakat (adat) khususnya masyarakat yang bersinggungan langsung dari kebijakan yang akan diberlakukan, di mana masyarakat (adat) dalam proses pembuatan kebijakan tentunya akan memasukan unsur-unsur dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat tersebut.

Dilihat dari aspek filosofis, maka tujuan dibuatnya hukum pada hakikatnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menjadi objek sasaran kebijakan. Artinya dalam implementasi hukum tidak hanya menguntungkan golongan tertentu, melainkan hadirnya hukum dalam masyarakat dapat memberikan kontribusi yang menguntungkan bagi semua pihak.

Penutup

Hukum merupakan sesuatu yang berkenaan dengan manusia, manusia yang berhubungan dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup, di mana pergaulan hidup ini akan melahirkan suatu budaya hukum,

budaya hukum” adalah keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum.

Hukum negara hendaknya tidak menyingkirkan keberadaan hukum adat, namun diharapkan dapat dicari titik-titik persamaan yang ada sehingga sejalan dalam pelaksanaannya, sebab pada hakikatnya semua aturan yang baik dibuat negara maupun masyarakat adat tentunya mempunyai tujuan filosofis yang sama yaitu untuk memberikan perlindungan dan mensejahterakan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Artidjo Alkostar, (ed), *Identitas Hukum Nasional*, Yogyakarta. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1997.
- Bernad Steny. “*Pluralisme Hukum : Antara PERDA Pengakuan Masyarakat Adat dan Otonomi Hukum Lokal*”. Dalam Jurnal Pembaharuan Desa dan Agraria, Sengketa Sumber Daya Alam. Volume III/Tahun III/2006. Kerja Sama Lapera Pustaka Utama – Pusat Kajian Agraria IPB.
- Esmi Warrasih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Penerbit Suryandaru Utama, Semarang.2005.
- I. Nyoman Nurjaya. *Menuju Pengelolaan Sumber Daya*

- Hutan Yang Berorientasi Pada Pola Kooperatif : Perspektif Legal Formal*; Makalah dalam Lokakarya : Peningkatan Fungsi dan Manfaat Sumber Daya Hutan Untuk Pengembangan Perusahaan dan Masyarakat, Yogyakarta, 29-30 Maret 1999.
- K.J Veerger., *Realita Sosial, Refleksi Filsafat Sosial Atas Hubungan Individu – Masyarakat Dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi*. Penerbit PT. Gramedia. Jakarta.
- Maria R Ruwiasuti. “*Sesat Pikir*” *Politik Hukum Agraria Membongkar Alat Penguasaan Negara Atas Hak Hak Adat*. Penerbit Insist Press dan Pustaka Pelajar. Yogyakarta.2000.
- Nasikun, *Hukum Dalam Paradigma Sistem Sosial* Jakarta. : PT. Rajawali Perss. 1997.
- Nasikun. *Sistem Sosial Indonesia*, Penerbit PT. Rajawali Perss, Jakarta. 1995.
- Otje Salman Sumadiningrat. *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*. Penerbit Alumni. Bandung.2002.
- R. Herlambang Perdana dan Bernadinus Stenly. *Gagasan Pluralisme Hukum Dalam Konteks Gerakan Sosial*. Dalam Andri Akbar, dkk. (penterjemah). *kumpulan tulisan Pluralisme Hukum : Sebuah Pendekatan Interdisiplin*. Penerbit Perkumpulan Untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), Jakarta. 2005.
- Ramlan Surbekti. *Memahami Ilmu Politik*. Penerbit PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta. 1992.
- Ratno Lukito. *Pergumulan Antara Hukum Islam Dan Adat Di Indonesia*. Penerbit INIS. Jakarta. 1998.
- Richard A Posner. *Frontiers of Legal Theory*. Cambridge, Massachusetts, London, England : Harvard University Press. 2001.
- Ruth S Meinzen Dick dan Rajendra Prahdan. *Pluralisme Hukum dan Dinamika Hak Atas Properti*. Dalam Andri Akbar, dkk 2005. (penterjemah) : *kumpulan tulisan Pluralisme Hukum : Sebuah Pendekatan Interdisiplin*. Penerbit Perkumpulan Untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), Jakarta.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta. : PT. Raja wali Perss.
- Soetandyo Wignjosoebroto. *Kebijakan Negara untuk mengakui atau tak mengakui eksistensi masyarakat adat berikut hak-hak atas tanahnya*, Dalam Jurnal masyarakat adat, Nomor. 01 tahun 1998.
- Suparman Marzuki. *Hukum Modern dan Institusi Sosial. Dalam Hukum dan Perubahan Masyarakat*. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. 1997